

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Thailand, Laos, dan Kamboja. Pembentukan organisasi regional ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral antarnegara di kawasan Asia Tenggara, bentuk kerjasama antarnegara itu meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dan perdamaian antar negara ASEAN.¹

Adapun pembahasan selanjutnya akan menitikberatkan pada kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai sebuah kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi, didalamnya terdapat aliran bebas dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin berkurang.²

Perkembangan global yang di alami oleh ASEAN menjadikan kawasan ini perlu melakukan kerjasama ekonomi di dunia internasional, mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara-negara lain di luar kawasan. Hal ini agar berbagai peluang kerjasama dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ASEAN untuk bersaing secara internasional, disamping itu ASEAN harus dapat menjadi pasar yang menarik bagi investasi asing.

Melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area* atau FTA) ASEAN melakukan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara mitra seperti Jepang, Cina, Korea, Australia, Selandia Baru dan India. Dalam kerjasama ini pula setiap negara anggota ASEAN dapat melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang menjadi mitra ASEAN tersebut.

¹http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html. Diakses pada tgl 22 Februari 2014. Pkl 11.16 WIB.

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, "ASEAN-China Free Trade Area". Jakarta, 2010. Hlm.2.

Dari beberapa mitra ASEAN, Cina merupakan negara yang mengalami perkembangan paling pesat. Pasca reformasi Deng Xio ping, Cina mengalami kemajuan yang sangat besar terutama dalam bidang ekonomi. Faktanya saat ini Cina telah menjadi salah satu negara penggerak perekonomian dunia. Hal ini terlihat pada produk-produk Cina yang telah mampu menjangkau berbagai belahan dunia. Selain luasnya wilayah perdagangan Cina juga memiliki kelebihan dimana harga produk yang di tawarkan jauh lebih murah. Disamping itu Cina memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan kemajuan teknologi serta infrastruktur lainnya yang tentu saja dapat menunjang kemajuan negara ini.

ACFTA dimulai pada tahun 2001 digelar *ASEAN-China Summit* di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan Cina ini menyetujui usulan Cina untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antarnegara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong.³ Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam *ASEAN-China Summit* tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Pertemuan ini menyepakati "*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*" yang didalamnya termasuk FTA. Sejak pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.⁴

Kerjasama ACFTA ini sangat penting, mengingat tujuan-tujuan yang ingin dicapai bisa memberikan keuntungan yang begitu besar bagi negara-negara yang terlibat apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu tujuan yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan yang dapat menguntungkan tanpa menjatuhkan satu dengan yang lainnya.

Dalam kesepakatan tersebut juga merealisasikan liberalisasi jasa dan investasi dan juga investasi yang telah disepakati setelah tarif barang dilakukan, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Dari beberapa tujuan ini ASEAN memiliki harapan, beberapa harapan yang dapat dicapai dengan jalan melaksanakan ACFTA. Salah satu tujuan tersebut adalah

³<http://www.map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11-policyforum/64-acfta-dan-indonesia>. Diakses tgl 22 Februari 2014. Pkl.11.30 WIB.

⁴*Ibid.*

memperbaiki keadaan perekonomian di negara-negara ASEAN yang menurun drastis akibat krisis khususnya bagi Laos, Vietnam, Myanmar dan Kamboja.

Dalam ACFTA seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Juli 2006.⁵ Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2007.

Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan pada 1 Januari 2012.⁶ Dengan adanya pengurangan tarif tersebut perdagangan bebas antara Cina dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah dilaksanakan tentu hal ini para pelaku yang bermain didalamnya harus mampu memanfaatkan peluang yang ada agar dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Perjanjian ACFTA ini dilakukan dalam beberapa tahap, fase awal dari kesepakatan perdagangan ini, dikenal dengan Program Panen Awal (*Early Harvest Programme*), EHP adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif *Most Favored Nations* sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. Ini dilaksanakan pada 1 Januari 2004, merupakan komitmen pemotongan tarif bagi produk-produk sektor pertanian ASEAN yang masuk ke Cina.⁷

Sejak perjanjian ACFTA mulai diberlakukan, tentunya negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia telah mempersiapkan diri dalam menghadapi peluang dan tantangan yang ada. Sebagai bagian dari keseriusan, pemerintah mengawali dengan meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China Free Trade Area* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.⁸

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷Daniel Pambudi dan Alexander C.Chandra, *Garuda Terbelit Naga: Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Institute Global for Justice, 2006. Hlm.29.

⁸<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2004/048-04.pdf>, "Sekretaris Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004, 15 Juni 2004". Diakses pada tgl 22 Februari 2014. Pkl.11.41 WIB.

Keputusan Presiden no.48 tahun 2004, pasal 1:

Mengesahkan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and The People's Republik of China* (Persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina), yang telah ditanda tangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada 4 November 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Cina yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya terlampir pada keputusan Presiden ini.⁹

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia telah siap dalam menghadapi ACFTA, namun kenyataan dilapangan berkata lain, industri-industri sebagai penopang perekonomian Indonesia justru terkena dampak negatif dengan adanya ACFTA, akibatnya ekonomi Indonesia seakan jalan ditempat. Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan oleh Warta Ekonomi Intelligence Unit, ada delapan sektor industri di Indonesia yang terancam akibat implementasi ACFTA.¹⁰

Kedelapan sektor itu ialah sektor alas kaki, sektor tekstil, sektor kimia, sektor besi, sektor baja, sektor furnitur, sektor elektronik, sektor makanan dan minuman. Sektor-sektor yang terancam ini membuat pasar domestik Indonesia kalah bersaing dengan produk impor yang terus membanjiri pasar domestik Indonesia, khususnya barang Cina. Fakta ini sejalan dengan hasil perhitungan BPS, dimana neraca perdagangan antara Indonesia dengan Cina kini mengalami defisit. Artinya nilai impor dari Cina masih lebih besar dibanding ekspor Indonesia ke Cina.¹¹

Pada tahun 2010 sesudah perjanjian ACFTA di implementasikan, industri alas kaki mengalami defisit yang cukup mempengaruhi perekonomian Indonesia, dan diperparah lagi pada tahun 2011 mengalami defisit kembali, hal ini membuktikan industri alas kaki sangat terkena dampak dengan adanya ACFTA.

⁹*Ibid.*

¹⁰ Ivan Lim dan Philipp Kauppert, "Apa Pilihan untuk Indonesia. Jurnal Sosial Demokrasi - Perdagangan bebas ASEAN - Cina: Berdagang Untuk Siapa?", vol.8, Februari-Juni, 2010.

¹¹*Ibid.*

Penyebab industri-industri di Indonesia tidak mampu bersaing dengan Cina, yaitu terkait sumber daya alam dan tenaga kerja yang mayoritas 60% nya masih berpendidikan level SD ke bawah.¹² Kondisi ini tentu saja sangat mempengaruhi kualitas kerja dan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Selain itu juga tingkat suku bunga kredit yang masih tinggi.

Berbeda dengan Indonesia, bunga pinjaman yang diterapkan pemerintah Cina dalam menggairahkan usaha rakyat hanya dipatok pemerintah antara 4-6% pertahun, sedangkan di Indonesia suku bunga kredit masih bertengger di angka 14-16%.¹³ Dengan suku bunga pinjaman sebesar itu, bisa dipastikan iklim usaha Indonesia akan terus menurun. Soal lain yang juga tak kalah penting adalah terkait penegakan dan juga kepastian hukum, masalah yang satu ini memang sangat sulit untuk didapatkan solusinya.

Stabilitas ekonomi yang baik didukung oleh langkah-langkah penguatan dalam sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi.¹⁴ Hal ini misalnya pada sektor industri dalam memproduksi barang, ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi mereka. Sebaliknya jika tidak ada dukungan dari sektor keuangan, industri domestik tersebut akan terhambat dalam melakukan produksi barang.

Selain itu, eksistensi industri domestik banyak ditentukan oleh kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bentuk kebijakan pemerintah seperti penentuan tingkat suku bunga, penetapan tarif pajak, dan alokasi pemberian kredit, ketiga hal tersebut sangat menentukan ketersediaan modal untuk menunjang produksi domestik dalam negeri.

Jadi apabila pemerintah menetapkan tingkat suku bunga dan pajak yang tinggi serta akses terhadap kredit yang sulit maka industri akan kekurangan modal, terjadi fluktuasi dalam jumlah barang yang diproduksi oleh industri domestik yang pada akhirnya berpeluang menyebabkan instabilitas ekonomi.

Untuk komoditas ekspor alas kaki kontribusinya terhadap total ekspor Indonesia sebesar 16%, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EDADA5DD-29CC-4E36-9067-7C3ACCA654F2/20126/>
"Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistim Keuangan". Diakses pada tgl 22 Februari 2014. Pkl.11.54 WIB.



I.2. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menyikapi ACFTA dalam sektor alas kaki 2010-2012?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini:

- a. Untuk menganalisa kerjasama perdagangan Indonesia dengan Cina dalam sektor alas kaki dalam kerangka ACFTA.
- b. Secara spesifik menjawab pertanyaan penelitian bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menyikapi ACFTA dari adanya kerjasama perdagangan Indonesia dengan Cina.

I.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti:

- a. Manfaat Praktis:
Memahami strategi pemerintah Indonesia dalam menyikapi ACFTA dalam sektor alas kaki 2010-2012.

b. Manfaat Akademis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu setiap pihak-pihak dalam menerapkan ilmu secara teoritis di bangku perkuliahan dan memberikan informasi bagi segenap civitas akademika terutama bagi yang mendalami studi Ilmu Hubungan Internasional.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

I.5. Tinjauan Pustaka

Begitu banyak literatur yang mengkaji dan membahas tentang ACFTA, adapun beberapa penulisan yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara lain:

a. Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia

- 1) Dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia – China”** oleh Ragimun menjelaskan mengenai perdagangan alas kaki Indonesia – Cina. Pemerintah terus mendorong ekspor non-migas dalam rangka meningkatkan devisa negara, salah satunya adalah dengan meningkatkan ekspor produk alas kaki.¹⁵ Untuk meningkatkan ekspor alas kaki, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengalihan pangsa pasar produk alas kaki selain negara tujuan Cina, yaitu ke beberapa negara Asia lainnya, demikian juga India maupun beberapa negara Timur Tengah sehingga nilai ekspor nasional dari produk alas kaki akan meningkat. Strategi yang dilakukan Cina antara lain melakukan penetrasi produk alas kaki ke Indonesia dengan produk yang berkualitas rendah dan harganya murah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus menggalakan peningkatan kualitas produk alas kaki karena nilai eksportnya lebih tinggi. Dengan demikian pengusaha produk alas kaki beserta UMKM alas kaki agar terus melakukan efisiensi usaha. Disisi lain pemerintah terus memberikan dukungan fiskal maupun non fiskal terhadap industri produk alas kaki nasional.

¹⁵Ragimun, “Analisis Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia – China”, Vol.3 no.2, 2012.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Erman Rajagukguk yang berjudul **“ASEAN - China Free Trade Agreement dan Implikasi Bagi Indonesia”** menjelaskan mengenai seberapa jauh dampak perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina yang menyangkut industri Indonesia.¹⁶ Pemerintah sudah mengidentifikasi beberapa sektor manufaktur yang akan terkena dampak terparah. Untuk produk-produk primer, Indonesia cenderung tetap kuat. Dalam usaha untuk mengantisipasi implikasi dari masuknya barang Cina ke Indonesia, infrastruktur mutlak perlu untuk mencegah biaya ekonomi tinggi. Potensi kerugian yang dialami industri manufaktur nasional sebagai dampak dari implementasi perjanjian *ASEAN - China Free Trade Agreement* (ACFTA) diperkirakan mencapai Rp.35 triliun per tahun. Nilai yang sangat besar tersebut hanyalah potensi kerugian yang bakal diderita oleh tujuh sektor manufaktur yakni industri petrokimia, pertekstilan, alas kaki dan barang dari kulit, elektronik, keramik, makanan dan minuman, serta besi dan baja. Perkiraan potensi kerugian tersebut merupakan hasil kajian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Pemerintah akan menjadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai salah satu senjata untuk mencegah membanjirnya barang impor dari Cina setelah diterapkannya perdagangan bebas ACFTA. SNI ini dipandang mampu menjaga kualitas barang yang masuk.

b. Dampak ACFTA Terhadap Indonesia

1) Dalam jurnal yang berjudul ***“Dampak Pelaksanaan ACFTA Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia”*** oleh Ibrahim, Meily Ika Permata dan Wahyu Ari Wibowo menganalisis mengenai kerjasama ACFTA dengan Indonesia, dalam analisis tersebut dijelaskan mengenai dampak dari implementasi perjanjian perdagangan, ekspor Indonesia menghadapi tantangan baru dengan

¹⁶ Erman Rajagukguk, “ASEAN-CHINA Free Trade Agreement dan Implikasinya bagi Indonesia”, Vol.2 no.3, 2009.

masuknya barang-barang impor Cina dikawasan ASEAN.¹⁷ Mitra dagang Indonesia dari kawasan ASEAN yang selama ini terjalin berpotensi mengalami penurunan. Dari hasil model GTAP, diperkirakan ekspor negara ASEAN ke kawasan ASEAN mengalami penurunan 4,9%, termasuk penurunan ekspor Indonesia sebesar 4,4%. Disisi lain ekspor Cina ke ASEAN mengalami peningkatan 50,5%. Hasil penelitian paper ini menunjukkan bahwa komoditas barang ekspor Cina dan negara ASEAN cenderung menunjukkan arah yang berkurang tingkat persamaannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan ekspor barang dari Cina yang bergerak ke arah ekspor barang industri. Sementara itu, saran terkait dengan tantangan yang dihadapi dengan maraknya produk Cina adalah dengan memanfaatkan impor barang dari Cina dengan teknologi menengah dan tinggi yang selama ini bersumber dari negara diluar kawasan. Dengan demikian, terbuka pilihan yang lebih besar bagi produsen untuk melakukan investasi mesin-mesin dan peralatan dengan pilihan barang dari Cina dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan demikian, arah kerjasama ACFTA yang kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di kawasan dan khususnya bagi Indonesia dapat kita optimalkan.

- 2) Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Daniel E Syauta dan Asniar yang berjudul *“Pengaruh ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Bisnis Indonesia dan Internasional”* yang menjelaskan bahwa dalam Data Badan Statistik Nasional Cina menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal kedua di tahun 2011 sebesar 9,5% dan hanya sedikit lebih lambat dari laju kuartal yang mencapai 9,7%.¹⁸ Namun, pertumbuhan tersebut tetap mengalahkan ekspektasi pasar yaitu 9,4%. Pertumbuhan output industri naik 15,1%. Kinerja ini merupakan percepatan cukup tajam

¹⁷Ibrahim, Meily Ika Permata, Wahyu Ari Wibowo, *“Dampak Pelaksanaan ACFTA Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia”*, Jakarta, 2010. Hlm 54-55

¹⁸Daniel E Syauta dan Asniar, *“Pengaruh ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Bisnis Indonesia dan Internasional”*, Jakarta, 2012. Hlm.5

dari sebesar 13,3%. Saat ini, *Gross Domestic Product* (GDP) Cina mencapai 20.446 triliun yuan atau 3.146 triliun dolar Amerika. Sementara itu, investasi aset tumbuh 25,6%. Sedangkan penjualan ritel naik 16,8%. Hal positif yang didapat oleh Cina tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama ACFTA yang dibangun, yang menjadikan kerjasama ACFTA menjadi positif bagi Cina tetapi kurang membawa dampak positif bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Indonesia.

c. ACFTA

- 1) Dalam penelitian yang berjudul **“The Impacts of ACFTA to Indonesia-China Trade”** oleh Abren Ginting, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai ACFTA. ASEAN terdiri dari negara-negara dalam tahap perkembangan yang berbeda dan dengan struktur ekonomi yang berbeda, menjadikan implikasi dari perjanjian perdagangan bebas dengan Cina akan berbeda untuk setiap anggotanya.¹⁹ Dengan adanya perjanjian perdagangan tersebut membawa peluang bagi negara-negara yang memproduksi barang dalam permintaan tinggi. Seperti halnya Indonesia dan Malaysia yakni sebagai eksportir minyak kelapa sawit menerima manfaat yang besar dari adanya kerjasama ACFTA tersebut. Penguatan kerjasama ekonomi juga bisa ditingkatkan melalui investasi Cina dengan negara-negara ASEAN, tentu hal ini menguntungkan negara anggota ASEAN yang tertinggal, seperti Laos, Kamboja dan Myanmar. Strategi yang dianjurkan untuk mengurangi dampak negatif dari ACFTA pada sektor industri Indonesia, pemerintah sebagai pelaku industri harus menemukan cara terbaik untuk mengurangi dampak buruk dari perjanjian tersebut dengan menemukan inovasi-inovasi untuk membangun UKM agar dapat berkembang dan dapat menambah nilai ekspor ke negara-negara luar. Selain itu survey yang dilakukan pemerintah juga melaporkan bahwa bahan baku yang mahal dan tinggi dan terbatasnya akses terhadap modal merupakan

¹⁹ Abren Ginting, “The Impacts of ACFTA to Indonesia - China Trade”, Vol.3 no2, 2011.

faktor yang perlu ditangani, ketersediaan dan keandalan infrastruktur memerlukan perbaikan yang signifikan.

- 2) Berbeda dengan jurnal yang diteliti oleh Mohamed Aslam yang berjudul **“The Impact of ASEAN-China Free Trade Area Agreement on ASEAN’s Manufacturing Industry”**²⁰ menjelaskan mengenai pembentukan kawasan perdagangan yang dilakukan oleh ASEAN dan Cina diharapkan dapat memperoleh keuntungan dari adanya *Free Trade Area* tersebut. Namun dengan melihat dari adanya pertumbuhan Cina yang cepat sejak awal 1900an tidak dapat menjamin adanya harapan positif yang didapat dari pembentukan *Free Trade Area* tersebut. Biaya Cina yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan produksi di negara anggota ASEAN, maka dari itu negara anggota ASEAN mengalami penurunan dalam melakukan ekspor. Adanya penurunan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi ekonomi ASEAN. Alasan utama tekanan ekonomi disebabkan oleh struktur produksi dan ekspor ASEAN dan Cina. Secara teotitis hanya negara yang memiliki biaya produksi terendah yang akan mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Dalam hal ini Cina memproduksi barang-barang dengan biaya yang rendah, hal tersebut berbeda dengan negara anggota ASEAN yang mengeluarkan biaya produksi masih diatas Cina. Maka dari itu, dalam jurnal ini menyebutkan kerjasama ACFTA tidak membawa dampak positif bagi ASEAN melainkan membawa dampak positif bagi Cina.

I.6. Kerangka Teori

Teori memberikan arah serta arti terhadap gejala masalah yang diteliti. Tanpa teori suatu penelitian tidak ada kesinambungan dan kurang jelas. Dasar teori dapat membantu dalam menentukan tujuan dan arah pembahasan, serta untuk meramalkan fungsi dari gejala-gejala sosial yang diteliti.

²⁰Mohamed Aslam, “The Impact of ASEAN-China Free Trade Area Agreement on ASEAN’s Manufacturing Industry”, Vol. 3, No. 1, 2012.

1.6.1. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional bukanlah sesuatu hal yang baru, namun sebuah paparan teoritis yang sistematis baru dikembangkan sekitar abad keenambelas dan ketujuhbelas. Dimulai dari teori Merkantilisme yang menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara tumbuh sebagai akibat adanya pengeluaran dari negara lain. Suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri.²¹

Para penganut Merkantilisme yang dipelopori oleh Mun²² (1571-1641) dengan karyanya *England's Treasure by Foreign Trade* sependapat bahwa, satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. *Surplus* ekspor yang dihasilkan kemudian dibentuk dalam logam-logam mulia khususnya emas dan perak. Semakin banyak logam mulia yang dimiliki suatu negara semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Selanjutnya, dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor, pemerintah akan dapat mendorong *output* dan kesempatan kerja nasional.²³

Sesudah itu, ahli-ahli ekonomi klasik menganalisis lebih mendalam lagi peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Teori keunggulan absolut (*absolute advantages*) dibangun oleh Adam Smith sebagai perbaikan atas Merkantilisme. Menurut Adam Smith, bahwa perdagangan akan meningkatkan kemakmuran bila dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan bebas.

Melalui perdagangan bebas, para pelaku ekonomi diarahkan untuk melakukan spesialisasi dalam upaya peningkatan efisiensi.²⁴ Setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak.²⁵

²¹Sadono Sukirno, "Makroekonomi: Teori Pengantar edisi 3", Jakarta: Rajawali Pers, 2008

²² Mun Thomas, "England's Treasure by Foreign Trade", New York, MacMillan, 1895

²³ R.A Salvatore, "The Dragon King Bk. 3", Grand Central Publishing, 1996

²⁴Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, "Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar", Jakarta LPFE, 2006

²⁵ F.C. Hamdy and B.G. Thomas, "New Therapeutic Concepts in Prostate Cancer", vol.88, 2001.

Jika sebuah negara lebih efisien daripada (atau memiliki keunggulan *absolute* terhadap) negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibanding (atau memiliki kerugian *absolute* terhadap) negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan *absolute*, dan menukarkannya dengan komoditi lain yang memiliki kerugian *absolute*.²⁶

Lebih lanjut teori perdagangan internasional dikemukakan oleh David Ricardo dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang dikenal dengan Nama *the Theory of Advantage* atau *The Theory of Relative Cost* yaitu mencoba melihat keuntungan atau kerugian dalam perbandingan *relative*. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang jika dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang, makin mahal barang tersebut.²⁷

Suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dalam memproduksi suatu barang jika biaya pengorbanannya dalam memproduksi barang tersebut lebih rendah daripada negara-negara lainnya. Perdagangan antara dua negara akan menguntungkan kedua belah pihak jika masing-masing negara memproduksi dan mengekspor produk yang keunggulan komparatifnya ia kuasai.²⁸

Selanjutnya Eli Heckscher dan Bertin Ohlin mengembangkan teori perdagangan internasional yang dikenal dengan teori Heckscher-Ohlin (H-O), menyatakan bahwa sumber utama perdagangan internasional adalah adanya perbedaan karunia sumber-sumber daya antarnegara. Teori ini sangat menekankan

²⁶Rahardja dan Manurung. Op.cit

²⁷ Nopirin, "Ekonomi Moneter buku II", Yogyakarta BPFE, 1999.

²⁸Paul L Krugman and Maurice Obstfeld, "International Economics: Theory and Policy", Boston, 2000.

saling keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antarnegara dan perbedaan penggunaannya dalam memproduksi berbagai macam barang, sehingga teori ini sering disebut sebagai teori proporsi faktor (*factor proportion theory*).

Negara-negara yang memiliki faktor produksi *relative* banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang *relative* langka atau mahal dalam memproduksinya.²⁹

Sebuah negara akan mengeskpor komoditi yang produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi yang *relative* melimpah dan murah di negara itu, dan dalam waktu bersamaan ia akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan sumber daya yang *relative* langka dan mahal di negara itu. Singkatnya, sebuah negara yang *relative* kaya atau berlimpah tenaga kerja akan mengekspor komoditi-komoditi yang *relative* padat modal (yang merupakan faktor produksi langka dan mahal di negara yang bersangkutan).

I.6.2. Teori *Free Trade Area*

Free trade (perdagangan bebas), sebagaimana dikemukakan kaum Liberalis, merupakan keadaan dimana melalui perdagangan tanpa halangan kebijakan proteksi negara kesejahteraan dapat disebarluaskan, karena dengan menganut konsep keuntungan komparatif setiap negara akan mampu memastikan keuntungannya masing-masing dalam perdagangan.³⁰

Perdagangan bebas atau *free trade* dalam satu dekade terakhir menjadi salah satu skema perdagangan internasional. Dalam skema tersebut setiap negara dapat memiliki keuntungan dalam mendorong pembangunan dinegaranya. *Free trade* sebenarnya merupakan pengembangan dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith "*the Wealth of Nation* (1776)"³¹ yang intinya meyebutkan bahwa satu negara atau bangsa dikatakan sejahtera jika ada *surplus* antara anggaran negara dan konsumsi masyarakatnya.

²⁹Nopirin. Op.cit.

³⁰K.J Holsti, "*International Politics, A Framework for Analysis, Sixth Edition*", New Jersey:Prentice-hall International, 1992. Hlm.102-103.

³¹Adam Smith "*the Wealth of Nation*", London, 1776.

Juga sebaliknya, negara dikatakan miskin atau belum sejahtera jika anggaran negaranya defisit. Untuk memperoleh *surplus* anggaran, maka negara tersebut dituntut menaikkan produksi barangnya dan menjualnya keluar negeri (karena jika hanya dijual didalam negeri tidak akan menambah pendapatan). Agar barang produksinya dapat beredar dinegara lain, maka diperlukan kemudahan dalam tarif-bea masuk dan keluar barang (ekspor-impor) serta efisiensi dalam produksi.

Salah satu pendekatan dalam *Free Trade* adalah disebut "*comparative advantage*" yang dikembangkan oleh David Ricardo³², dalam teori ini disarankan satu negara tidak harus memproduksi semua barang yang dikonsumsi masyarakat, akan tetapi dapat memfokuskan pada 1-2 jenis produk yang dapat menjadi keunggulan dari negara lain sehingga dapat di ekspor ke negara lain. Sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya dapat mengimpor barang tersebut dari negara produsen dengan harga lebih murah. Dengan teori ini maka satu negara dapat bersaing dengan negara lain, karena memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara lainnya. Keunggulan dapat berasal dari tenaga kerja (*skill* atau upah), teknologi atau sumberdaya alamnya.

Untuk negara berkembang seperti Indonesia, skema *free trade* memiliki potensi untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi negara lebih cepat dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena dengan terbuka lebarnya lalu lintas investasi dan ekspor barang, akan berimplikasi pada lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat.

Tantangan kedepan adalah pemerintah mempersiapkan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara tuntutan negara maju dengan kemampuan SDM dan keuangan negara. Sebagai negara tropis yang kaya dengan sumberdaya alamnya dapat dijadikan *comparative advantage* yang dimiliki Indonesia, untuk dapat berperan lebih didalam skema perjanjian *free trade*.

David Balaam dan Michael Veseth mengidentifikasi *free trade area* lebih lanjut sebagai salah satu derajat menuju integrasi ekonomi. Di dalam integrasi ekonomi sekelompok negara setuju untuk mengindahkan batasan-batasan negara

³² David Ricardo, "*Principles of Political Economy and Taxation*", London, 1817.

mereka untuk tujuan ekonomi tertentu, sehingga membentuk sistem pasar yang lebih besar dan lebih terikat. Integrasi ekonomi sendiri terdiri atas:³³

- a. Level pertama, pembentukan *free trade area*, dimana negara-negara anggota setuju untuk menghapus hambatan tarif terhadap perdagangan barang dan jasa dari luar kawasan tersebut belum ditentukan.
- b. Level berikut dari integrasi ekonomi adalah *customs union*, dimana selain negara-negara anggota setuju untuk berdagang secara bebas tarif dalam batasan kolektif mereka, suatu set tarif yang seragam juga diberlakukan untuk produk-produk dari luar *free trade area* tersebut. Dalam tingkat ini, eliminasi hambatan-hambatan non tarif masih belum ditentukan.
- c. Setelah *customs union*, maka *economic union* adalah tingkat terakhir dari integrasi politik dan ekonomi, dimana integrasi penuh pasar telah dapat tercapai. Pada tingkat ini hambatan non tarif sudah dieliminasi, sebagaimana hambatan tarif pun dihilangkan.

Kerja sama ekonomi dan keuangan khususnya, di bidang perdagangan internasional, saat ini mengarah kepada pembentukan kerjasama guna mewujudkan integrasi ekonomi dan keuangan regional.³⁴

³³ David balaam dan Michael Veseth, "Introduction to International Political Economy", new Jersey-Hall, 1996. Hlm.219.

³⁴Hamdy Hady, "Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional", Jakarta, 2010. Hlm.88

I.7. Alur Pemikiran



I.8. Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa:

- a. Kerjasama ACFTA tersebut membawa dampak positif bagi Cina. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya nilai ekspor Cina ke Indonesia yang menunjukkan angka peningkatan. Hal sebaliknya justru terjadi kepada Indonesia yang menampung dampak negatif dari adanya kerjasama perdagangan dalam sektor alas kaki tersebut.
- b. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia pun kurang efisien untuk meminimalisir lonjakan barang-barang impor yang terlampaui banyak dari Cina.

I.9. Metode Penelitian

I.9.1. Tipe Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan permasalahan kerjasama perdagangan Indonesia dengan Cina dalam sektor alas kaki dalam kerangka ACFTA dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut.

I.9.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data yang diperoleh melalui studi literatur atau kepustakaan demi mendapatkan data-data untuk menunjang penulisan penelitian. Data-data tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari dokumen-dokumen resmi yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan bacaan dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel di media cetak, situs internet, dan sumber-sumber website resmi dari nasional maupun internasional, serta data-data lainnya yang terkait dengan penelitian.

I.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*Library Research*), yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Sejumlah bahan tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti di perpustakaan maupun di lembaga-lembaga terkait.

I.9.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, bersifat Deskriptif Kualitatif. Menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan.

I.10. Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis menjabarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan penjabaran dari pendahuluan yang dimulai dari penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: SEKTOR ALAS KAKI DALAM KERANGKA ACFTA 2010 – 2012

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi mengenai ACFTA, kesepakatan dalam ACFTA, program penurunan tarif-bea masuk, peraturan nasional Indonesia terkait ACFTA serta kondisi sektor alas kaki di Indonesia.

BAB III: STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENYIKAPI ACFTA PADA SEKTOR ALAS KAKI 2010 – 2012

Bab ini membahas strategi pemerintah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi, serta kebijakan – kebijakan pemerintah serta upaya dalam menyikapi ACFTA pada sektor alas kaki.

BAB IV: KESIMPULAN

Merupakan kesimpulan serta saran dari penjabaran dan analisa yang terkandung dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

